

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada bulan Oktober 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Kerinci sebesar 3,03 atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 103,23 pada Oktober 2023 menjadi 106,36 pada Oktober 2024. Komoditas penahan inflasi year on year (y-on-y) adalah beras (-0,43), cabai merah (-0,31), ikan tongkol/ikan ambu-ambu (-0,16), cabai hijau (-0,13), bensin ((-0,12), tahu mentah (-0,11) dan tomat (-0,09).

Pada bulan November 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Kerinci sebesar 2,28 atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 104,12 pada November 2023 menjadi 106,49 pada November 2024. Komoditas pendorong inflasi year on year (y-on-y) adalah daging ayam ras (0,46), bawang merah (0,42), emas perhiasan (0,41), jengkol (0,37), minyak goreng (0,31), rekreasi (0,26), sigaret kretek mesin (0,25) dan jeruk (0,24).

Pada bulan Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Kerinci sebesar 2,07 atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen dari 105,09 pada Desember 2023 menjadi 107,27 pada Desember 2024. Komoditas pendorong inflasi year on year (y-on-y) adalah daging ayam ras (0,54), ikan serai (0,42), minyak goreng (0,41), emas perhiasan (0,38), jengkol (0,34), rekreasi (0,26), sigaret kretek mesin (0,25), dan jeruk (0,24).

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Klasifikasi permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Ketersediaan Pasokan :

- Masih banyaknya bahan pokok yang didatangkan dari luar daerah yang menyebabkan terganggunya pasokan.
- Perubahan cuaca yang dapat mengganggu siklus pola tanam yang dilakukan petani.
- Terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang menyebabkan produksi pertanian menurun.

2. Keterjangkauan Harga :

- Resiko gejolak harga pada hari besar keagamaan dan kurangnya pasokan dari luar daerah.

3. Kelancaran Distribusi :

- Jalur distribusi yang menghubungkan Kabupaten Kerinci ke daerah tetangga sering terjadi longsor sehingga kelancaran distribusi menjadi terganggu.

4. Kemoneteroran Efektif :

Belum pahamnya Sebagian besar masyarakat tentang pentingnya pengendalian inflasi, sehingga dibutuhkan edukasi dan sosialisasi yang konsisten.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kerinci melaksanakan monitoring data informasi harga kebutuhan bahan pokok dan barang strategis lainnya yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk memperoleh data harga pasar sesuai dengan komoditi di sektor perdagangan, agar dapat mengetahui fluktuasi harga untuk selanjutnya dievaluasi dalam mencari faktor-faktor penyebab dan mencari solusi pemecahannya. Kegiatan ini dilaksanakan setiap Hari Senin dan Kamis di 3 (tiga) pasar besar yang dianggap sebagai barometer di Kabupaten Kerinci yaitu Pasar Bedeng VII Kayu Aro, Pasar Senen Siulak dan Pasar Hiang Sitinjau Laut. Hasil dari kegiatan monitoring ini, dimana dapat menyajikan/ memberikan informasi harga yang berlaku pada saat itu.
 2. TPID Kabupaten Kerinci mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan secara online dalam pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah Tahun 2024 yang rutin dilaksanakan setiap minggu.
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam melakukan evaluasi kebijakan pengendalian inflasi melibatkan sejumlah instansi daerah maupun instansi vertikal. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mensinergikan pelaksanaan tugas tersebut disatukan dalam suatu wadah koordinasi dalam menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, sehingga inflasi dapat terkendali. Koordinasi yang dilaksanakan dibedakan dalam :

- Rapat koordinasi periodik, yang dilaksanakan setiap triwulan
- Rapat koordinasi tematik, yang dilaksanakan apabila terdapat permasalahan mendesak atau ada kebijakan dari pemerintah pusat atau pemerintah provinsi yang harus ditindak lanjuti

Poin-poin penting hasil rapat :

1. Bersinergi dengan pihak Distributor bahan pokok untuk pengendalian harga.
 2. Memberikan bantuan langsung berupa benih/bibit bagi pelaku usaha di bidang pertanian dan perikanan.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.